

PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Ilham Ahmad Raihan¹, Moh Fadhilla Adzhani S², Aqshal Raihan Rahman³, R Aria Diva Risjunarko⁴, Muhammad Sayyid Al Farros⁵

ilhamahmadraihan150204@gmail.com¹, mohfadhilla26@gmail.com², raihaanaqshal30042004@gmail.com³, divacool550@gmail.com⁴, sayyidalfarros12@gmail.com⁵

Universitas Pakuan

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam penegakan hukum pidana internasional. Studi ini juga mengkaji efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam melaksanakan resolusi mengenai hukum pidana internasional dan tantangan yang terkait dengan hal ini, penulis mengkaji konsep hukum yang relevan dengan menggunakan metode hukum normative dan penelitian kepustakaan. Pembahasan utama mencakup peran Dewan Keamanan PBB dalam pembentukan pengadilan pidana khusus seperti ICTY dan ICTR, hubungan mereka dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), penerapan sanksi, hak veto dll, ini termasuk kewenangan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yuridiksi terbatas Pengadilan Kriminal Internasional, dan kurangnya kemauan negara anggota untuk bekerja sama. Studi ini juga menyoroti langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana internasional oleh Dewan Keamanan PBB. Ini termasuk reformasi veto, penguatan kerja sama internasional, penguatan kapasitas Pengadilan Kriminal internasional, dan peningkatan sumber daya dan transparansi. Temuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan dalam memastikan penegakan hukum pidana internasional yang adil dan efektif.

Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Penegakan Hukum Pidana Internasional ICTY, ICTR, Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

PENDAHULUAN

Menurut Piagam PBB, tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia berada di tangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). DK PBB diberdayakan untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, seperti menjatuhkan sanksi dan membentuk pengadilan internasional ad hoc untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional besar. Untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan genosida di wilayah tersebut, DK PBB, misalnya, membentuk Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR).¹ Meskipun demikian, sering terjadi perdebatan mengenai kemampuan DK PBB untuk secara efektif menegakkan hukum pidana internasional. Hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap DK PBB-Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris-merupakan salah satu kritik utama. Hak veto ini sering kali menghalangi pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menangani pelanggaran hukum internasional, terutama ketika kepentingan politik negara-negara ini dipertaruhkan.² Hubungan antara Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) juga telah dipertanyakan. Melalui prosedur yang diuraikan dalam Statuta Roma, DK PBB dapat mengirimkan masalah ke ICC dan menghentikan penyelidikan atau penuntutan, meskipun ICC didirikan sebagai badan peradilan pidana internasional yang terpisah. Hal ini menimbulkan keraguan akan independensi ICC dan juga kemungkinan adanya campur tangan politik dalam sistem peradilan pidana internasional.³ Peran DK PBB dalam menegakkan hukum pidana internasional harus dikaji secara serius berdasarkan hal ini. Pemeriksaan seperti itu akan membantu dalam mengidentifikasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi dan dalam mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan keefektifan DK PBB dalam memenuhi mandatnya, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana internasional yang adil dan independen secara politik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul “Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional” sebagai fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus peran PBB dalam Penegakan Hukum. Maka rumusan masalah yang kita ambil dari penelitian ini yaitu 1. Bagaimana peran dan kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam mendukung penegakan hukum pidana internasional. 2. Sejauh mana efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam mengimplementasikan resolusi terkait penegakan hukum pidana internasional. 3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan perannya dalam konteks hukum pidana internasional. 4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam penegakan hukum pidana internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Yuridis Normatif dan Studi Pustaka digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan metodologis digunakan oleh metode penelitian Yuridis Normatif untuk menguji hukum, teori, dan konsep yang terkait.

¹ Damayanti, N. S. (2019). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). *SASI*.

² Siregar, E. S. (2024). Antara Idealisme dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB dalam Menegakkan dan Melemahkan Hukum Internasional di Tengah Kompleksitas Global. *INNOVATIVE*.

³ Damayanti, N. S. (2019). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). *SASI*.

Membaca, dan menganalisis sumber-sumber penelitian ada beberapa kegiatan yang terkait dengan metode pengumpulan data kepustakaan yang merupakan bagian dari metode studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana peran dan kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam mendukung penegakan hukum pidana internasional

1. Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc

Dewan Keamanan PBB Memiliki kekuasaan untuk membentuk pengadilan pidana internasional ad hoc untuk mengadili orang-orang yang telah melakukan kejahatan internasional yang besar. Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) adalah dua contoh spesifik. Tugas DK PBB untuk menegakkan perdamaian dan keamanan global menjadi dasar pembentukan kedua pengadilan ini.⁴

2. Hubungan dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Meskipun ICC adalah pengadilan permanen dan independen, DK PBB memainkan peran penting dalam cara kerjanya. Jika suatu situasi dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, DK PBB dapat menyerahkannya kepada ICC sesuai dengan Pasal 13(b) Statuta Roma. Lebih lanjut, melalui resolusi yang disahkan di bawah Bab VII Piagam PBB, DK PBB dapat menanggukkan investigasi atau penuntutan ICC untuk jangka waktu 12 bulan, dengan opsi perpanjangan, sesuai dengan Pasal 16 Statuta Roma.⁵

3. Penerapan Sanksi dan Tindakan Lainnya

Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk menghukum orang atau organisasi yang terlibat dalam kejahatan internasional dengan hukuman seperti pembekuan aset, larangan bepergian, dan embargo senjata. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan pada individu yang membahayakan perdamaian dan keamanan global serta untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum internasional. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan terhadap kemampuan dan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB dalam menegakkan hukum pidana internasional. Di antaranya adalah hak veto yang dimiliki oleh Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pengambilan keputusan dapat terhambat oleh hak veto ini, terutama ketika kepentingan politik salah satu anggota tetap dipertaruhkan. Selain itu, tidak semua negara anggota PBB merupakan pihak dalam Statuta Roma, yang dapat membatasi yurisdiksi ICC meskipun Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk mengirimkan masalah ke ICC.⁶

Secara keseluruhan, berbagai instrumen yang dimiliki Dewan Keamanan PBB sangat penting bagi penegakan hukum pidana internasional. Namun, dinamika politik internasional dan kolaborasi negara anggota memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas posisi ini.

2. Sejauh mana efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam mengimplementasikan resolusi terkait penegakan hukum pidana internasional.

Dengan mengeluarkan resolusi yang dapat ditegakkan secara hukum untuk negara-negara anggota, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam menegakkan hukum pidana internasional. Namun, sejumlah situasi, seperti dinamika politik global

⁴ Damayanti, N. S. (2019). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). *SASI*.

⁵ Damayanti, N. S. (2019). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). *SASI*.

⁶ Damayanti, N. S. (2019). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). *SASI*.

dan penggunaan hak veto oleh anggota tetap, sering kali memengaruhi seberapa baik Dewan Keamanan PBB mengimplementasikan resolusi-resolusi ini. Pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) pada tahun 1993 melalui Resolusi DK PBB 827 merupakan salah satu ilustrasi. Proses pelaksanaannya mengalami kesulitan, termasuk dalam hal penangkapan para tersangka, yang membutuhkan kerja sama negara-negara anggota dan sering kali terhalang oleh kepentingan politik, meskipun pengadilan ini berhasil menuntut beberapa penjahat perang.⁷

Selain itu, anggota tetap DK PBB sering menggunakan hak veto mereka untuk menggagalkan implementasi resolusi yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana internasional. Sebagai contoh, veto dari anggota tetap yang memiliki kepentingan politik dalam sengketa sering kali menggagalkan upaya untuk memberlakukan resolusi yang mengecam tindakan tertentu atau memulai penyelidikan internasional dalam konflik Israel-Palestina.⁸ Selain itu, meskipun Dewan Keamanan PBB dapat menjatuhkan hukuman kepada orang atau organisasi yang melakukan kejahatan internasional, implementasi dan kepatuhan negara anggota menentukan seberapa efektif sanksi tersebut. Efektivitas resolusi yang diberlakukan sering kali dikurangi oleh langkah-langkah penegakan hukum yang lemah dan penerapan hukuman yang tidak konsisten. Secara keseluruhan, isu-isu politik, penggunaan hak veto, dan tingkat kerja sama dari negara-negara anggota sering mempengaruhi seberapa efektif resolusi yang telah disahkan dapat diimplementasikan, meskipun Dewan Keamanan PBB memiliki peran dan yurisdiksi yang cukup besar dalam mengimplementasikan hukum pidana internasional. Hal ini mengimplikasikan bahwa untuk menjamin pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB yang efisien dan dapat diandalkan, prosedur penegakan hukum harus ditingkatkan dan direformasi.⁹

3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan perannya dalam konteks hukum pidana internasional.

Dalam menjalankan mandatnya untuk menegakkan hukum pidana internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi beberapa kesulitan. Di antaranya adalah:

1. Pengaruh Politik dan Hak Veto

Dampak politik global merupakan salah satu hambatan utama, terutama dalam kaitannya dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB-Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis-dan hak veto mereka. Upaya untuk menegakkan hukum pidana internasional dapat terhambat oleh seringnya mereka menggunakan hak veto untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing negara. Sebagai contoh, Rusia, sekutu penting rezim Suriah, memveto upaya untuk merujuk kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam kasus Suriah.¹⁰

⁷ Arafat, M. R. (n.d.). EFEKTIVITAS YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTRNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM MENCEGAH IMPUNITAS. *UIRLawReview*.

⁸ Devano, M. H. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *YUSTITABELEN*.

⁹ Devano, M. H. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *YUSTITABELEN*.

¹⁰ Winata, F. (2024). PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNATIONAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TERHADAP MANUSIA: TANTANGAN DAN PELUANG. *Jurnal Kritis Studi Hukum*.

2. Ketergantungan pada Kerja Sama Negara Anggota

Kerja sama negara-negara anggota sangat penting untuk pelaksanaan resolusi-resolusi DK PBB. Kemampuan DK PBB untuk secara efektif menegakkan hukum pidana internasional terhambat karena tidak adanya bantuan penuh, terutama yang berkaitan dengan penangkapan dan pemindahan tersangka, pengumpulan bukti, dan pengenaan sanksi.¹¹

3. Keterbatasan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Yurisdiksi ICC terbatas pada negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, meskipun DK PBB memiliki wewenang untuk merujuk masalah ke ICC. Hal ini membatasi kekuasaan DK PBB untuk menegakkan hukum pidana internasional secara global karena pemerintah yang bukan penandatangan Statuta tidak tunduk pada yurisdiksi ICC.¹²

4. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Sumber daya keuangan dan infrastruktur yang signifikan diperlukan untuk menegakkan hukum pidana internasional. Menyelidiki, menuntut, dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan asing dapat terhambat oleh pembatasan ini.¹³

5. Definisi dan Interpretasi Kejahatan Internasional

Definisi dan arti dari beberapa kejahatan internasional, seperti kejahatan agresi, masih diperdebatkan oleh negara-negara anggota. Perselisihan ini berpotensi merusak konsensus Dewan Keamanan PBB dan mengurangi keefektifan penegakan hukum pidana internasional.¹⁴

4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam penegakan hukum pidana internasional.

Untuk meningkatkan efektivitas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam penegakan hukum pidana internasional, beberapa langkah dapat dipertimbangkan:

1. Reformasi Hak Veto

Pengambilan keputusan sering kali terhambat oleh hak veto lima anggota tetap DK PBB, terutama jika menyangkut hal-hal yang melibatkan kepentingan nasional mereka. Membatasi atau mengatur ulang proses veto adalah dua contoh reformasi yang dapat meningkatkan respon DK PBB terhadap pelanggaran hukum internasional dan mengurangi kebuntuan dalam pengambilan keputusan.¹⁵

2. Peningkatan Kerja Sama Internasional

Kolaborasi negara-negara anggota sangat penting untuk efektivitas DK PBB. Penegakan hukum pidana internasional dapat diperkuat dengan meningkatkan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi, penegakan sanksi, dan dukungan misi perdamaian.¹⁶

3. Penguatan Kapasitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

¹¹ Winata, F. (2024). PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNATIONAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TERHADAP MANUSIA: TANTANGAN DAN PELUANG. *Jurnal Kritis Studi Hukum*.

¹² Damayanti, N. S. (2020). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). *SASI*.

¹³ Winata, F. (2024). PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNATIONAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TERHADAP MANUSIA: TANTANGAN DAN PELUANG. *Jurnal Kritis Studi Hukum*.

¹⁴ Ichsan, A. P. (2025). Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*.

¹⁵ Siregar, E. S. (2024). Antara Idealisme dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB dalam Menegakkan dan Melemahkan Hukum Internasional di Tengah Kompleksitas Global. *INNOVATIVE*.

¹⁶ Ichsan, A. P. (2025). Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*.

Dengan mendesak lebih banyak negara untuk meratifikasi Statuta Roma dan memberikan dukungan politik dan keuangan yang lebih besar, DK PBB dapat membantu ICC. Hal ini akan menjamin bahwa lebih banyak penjahat internasional yang dapat diadili dan memperluas kewenangan ICC.¹⁷

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Legitimasi dan kepercayaan terhadap DK PBB dapat ditingkatkan dengan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan meminta pertanggungjawaban negara anggota atas ketidakpatuhan terhadap keputusan.¹⁸

5. Peningkatan Sumber Daya dan Kapasitas Operasional

Akan lebih mudah bagi DK PBB untuk menegakkan hukum pidana internasional jika DK PBB memiliki infrastruktur, uang, dan staf yang cukup untuk memenuhi mandatnya.¹⁹

Diyakini bahwa dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini, DK PBB akan lebih siap untuk memenuhi mandatnya dalam menegakkan hukum pidana internasional dan menjamin bahwa keadilan ditegakkan pada skala dunia.

KESIMPULAN

Dewan Keamanan PBB memainkan peran penting dalam menegakan hukum pidana internasional. PBB memiliki kewenangan untuk membentuk pengadilan khusus, merujuk kasus ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), dan menjatuhkan sanksi kepada individu dan organisasi. Terlibat dalam kejahatan internasional. Namun, efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam melaksanakan resolusi-resolusi yang menegakan hukum pidana internasional masih bergantung pada veto anggota tetap, kurangnya kerja sama antar negara anggota, dan keterbatasan yuridiksi Dewan Keamanan PBB. Hal ini sering kali terhambat oleh factor politik, seperti pembatasan ICC. Kendala yang dihadapi Dewan Keamanan PBB meliputi pengaruh politik globalnya, ketergantungannya pada kerja sama negara-negara anggota, sumber daya yang terbatas, dan perbedaan interpretasi mengenai definisi kejahatan internasional. Untuk meningkatkan efektivitas penuntutan internasional, Langkah-langkah seperti reformasi veto, penguatan kerja sama internasional, penguatan kapasitas ICC, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan peningkatan sumber daya oprasional harus dipertimbangkan. Secara keseluruhan, Dewan Keamanan PBB memiliki peran penting dalam menegakan hukum pidana internasional, tetapi pencapaian tujuan ini sangat bergantung pada perkembangan politik internasional dan kerja sama antar negara. Oleh karena itu, reformasi lebih lanjut, pengembangan kapasitas dan kerja sama di tingkat internasional sangat penting untuk memastikan penegakan hukum pidana internasional yang lebih efektif dan adil.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam penegakan hukum pidana internasional:

1. Reformasi Hak Veto Pengambilan keputusan yang sering kali terhambat oleh hak veto lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum pidana internasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan reformasi terhadap mekanisme hak veto, baik dengan membatasi penggunaan veto dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum internasional atau dengan menciptakan prosedur yang lebih

¹⁷ Winata, F. (2024). PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNATIONAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TERHADAP MANUSIA: TANTANGAN DAN PELUANG. *Jurnal Kritis Studi Hukum*.

¹⁸ Siregar, E. S. (2024). Antara Idealisme dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB dalam Menegakkan dan Melemahkan Hukum Internasional di Tengah Kompleksitas Global. *INNOVATIVE*.

¹⁹ Siregar, E. S. (2024). Antara Idealisme dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB dalam Menegakkan dan Melemahkan Hukum Internasional di Tengah Kompleksitas Global. *INNOVATIVE*.

transparan dan adil dalam pengambilan keputusan.

2. Peningkatan Kerja Sama Internasional Penegakan hukum pidana internasional memerlukan kerja sama yang lebih kuat antara negara-negara anggota PBB. Kerja sama yang lebih intens dalam hal pertukaran informasi, penangkapan tersangka, penyelidikan, dan implementasi sanksi akan memperkuat efektivitas Dewan Keamanan PBB. Negara-negara anggota perlu memiliki komitmen yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan bersama dalam menegakkan keadilan internasional.
3. Penguatan Kapasitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) ICC memainkan peran penting dalam penegakan hukum pidana internasional, tetapi kapasitasnya masih

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M. R. (n.d.). EFEKTIVITAS YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTRNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM MENCEGAH IMPUNITAS. *UIRLawReview*.
- Damayanti, N. S. (2019). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). *SASI*.
- Damayanti, N. S. (2020). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). *SASI*.
- Devano, M. H. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *YUSTITIABELEN*.
- Ichsan, A. P. (2025). Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*.
- Siregar, E. S. (2024). Antara Idealisme dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB dalam Menegakkan dan Melemahkan Hukum Internasional di Tengah Kompleksitas Global. *INNOVATIVE*.
- Winata, F. (2024). PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNATIONAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TERHADAP MANUSIA: TANTANGAN DAN PELUANG. *Jurnal Kritis Studi Hukum*.